

KASUS LINGKUNGAN

Target Penegakan Hukum 10 Kasus

Jakarta, Kompas - Akhir Desember 2012 mendatang, Satgas Kelembagaan REDD+ menargetkan penanganan 10 kasus besar pelanggaran lingkungan yang disidik secara terpadu. Penegakan hukum terpadu ini akan dipertegas dengan penyusunan surat kesepakatan bersama antara Kepala Polri, Kepala Kejaksaan Agung, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan.

Koordinator Kelompok Kerja Pengkajian Hukum dan Penegakan Hukum Satgas Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+) Mas Achmad Santosa, Jumat (29/6), di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengatakan, pihaknya sedang mengoordinasikan tim penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri dan Jaksa. "Koordinasi ini intens dan berjalan terus-menerus," ucapnya.

Tim ini punya 10 target operasi kasus besar prioritas untuk ditangani. Bulan Desember 2012, ditargetkan terungkap jelas.

"Untuk 10 kasus ini tersangkanya bisa banyak. Kasusnya perambahan hutan oleh kegiatan ekonomi. Ada tambang dan kebun di Kalteng, Aceh, dan lain- lain," kata Mas Achmad Santosa.

Kerja sama antarlembaga dalam penanganan kasus ini akan menjadi model penegakan hukum lingkungan. "Tanpa ada kami (Satgas Kelembagaan REDD+), koordinasi ini akan terus," ucap Achmad yang juga Deputi Penegakan Hukum Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pengikatan kerja sama antarlembaga ini dituangkan melalui penandatanganan surat kesepakatan bersama tentang penegakan hukum terintegrasi pada Juli 2012. Pada SKB ini dipertegas lembaga yang mengoordinasi dan mekanisme penanganannya.

Diragukan

Penegakan hukum terpadu diragukan. Pasalnya, kebijakan pembangunan Indonesia yang dikeluarkan lembaga negara cenderung merusak lingkungan.

"Praktik pengerukan sumber daya alam tanpa batas untuk kepentingan segelintir elite kuasa dan kuasa modal. Merusak lingkungan dengan penuh kesadaran terus berlanjut, seperti tecermin pada desain Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ironi negara yang rentan bencana," kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang Walhi.

Penegakan hukum, lanjut dia, tak akan banyak berpengaruh. Sistem atau kebijakan nasional mengarah pada eksploitasi sumber daya di luar daya dukung lingkungan. Contohnya, kebijakan kehutanan yang memberi legalitas lebar bagi perusahaan untuk masuk ke kawasan lindung.

Ia mencontohkan berbagai kasus tambang di Taman Nasional (TN) Batang Gadis (Sumut), TN Nani Wartabone (Gorontalo), TN Lai Wanggi Wanggameti (NTT), dan TN Lolobata (Malut). "Mereka masuk dengan legalitas alih fungsi hutan," ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai pengubahan arah dan ideologi kebijakan instansi pemerintah menangani sumber daya alam sangat penting. Selanjutnya, penegakan hukum bisa dilakukan efektif. (ICH)